

ANALISIS PROBLEMATIKA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DENGAN MENGGUNAKAN *PROBLEM TREE* *ANALYSIS*

Oleh:

Krisna Dwi Darna Iswanto¹

Adhim Lathif Aliy²

Muhammad Noer Falaq Al-Amin³

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: JL. Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur (60231).

Korespondensi Penulis: krisnadwi.22001@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *Education in Indonesia reaps many problems ranging from poverty to limited access to education. According to a survey taken by Word pupulation review in 2022, the IQ of Indonesian citizens is 78.49 on average, which is ranked tenth among all countries in ASEAN, from this survey Indonesia is still ranked low. This problem is a challenge for the Indonesian government, because education is one of the references that determines the nation's progress in the future. Various policies have been introduced by the Indonesian government, one of which is KIP - K which is a scholarship program for college courses. However, this policy has reaped various pros and cons from various groups, from students to universities. By using problem tree analysis for decision making in the KIP – K program, using qualitative methods that focus on literature study by reading and collecting various references from books, journals, articles and online media.*

Keyword: *Education, KIPK, Program.*

Abstrak. Pendidikan di Indonesia menuai banyak permasalahan mulai dari kemiskinan hingga keterbatasan akses Pendidikan. Menurut survei yang diambil oleh *Word pupulation review* tahun 2022 IQ warga Negara Indonesia dengan rata – rata 78,49 yang

Received April 14, 2024; Revised April 28, 2024; May 02, 2024

*Corresponding author: krisnadwi.22001@mhs.unesa.ac.id

ANALISIS PROBLEMATIKA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DENGAN MENGGUNAKAN *PROBLEM TREE* ANALYSIS

menduduki peringkat ke sepuluh dari seluruh negara se-ASEAN, dari survei tersebut indonesia masih berada di predikat kurang. Permasalahan tersebut merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah Indonesia, karena Pendidikan merupakan salah satu acuan yang menentukan kemajuan bangsa di masa depan. Berbagai kebijakan dihardirkan oleh pemerintah indonesia salah satunya adalah KIP – K yang merupakan sebuah program beasiswa untuk menempuh perguruan tinggi. Tetapi dalam kebijakan tersebut menuai berbagai pro dan kontra dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa sampai dengan universitas. Dengan menggunakan analisis pohon masalah guna pengambilan keputusan pada program KIP – K, menggunakan menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada studi literatur dengan membaca serta mengumpulkan berbagai referensi dari buku, jurnal, artikel, dan media online.

Kata Kunci: Pendidikan, KIPK, Program.

LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. (Saptono, 2017). Dalam situasi apapun, manusia tidak akan bisa menolak dampak yang ditimbulkan dari pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan jenisnya, pendidikan dibagi menjadi tiga bagian yaitu : a) Pendidikan Formal, b) Pendidikan informal, dan c) pendidikan non-formal. Pendidikan formal dimulai dari bangku sekolah dasar (SD) hingga ke universitas. Sedangkan pendidikan informal merupakan jenis pendidikan atau pelatihan yang didapatkan dari lingkungan keluarga atau masyarakat yang diselenggarakan tanpa melibatkan organisasi tertentu. Pendidikan non-formal merupakan segala bentuk pendidikan yang diberikan secara terstruktur namun didapatkan dari luar wadah pendidikan formal. Dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia, tentu saja mempunyai dampak positif dan negatif di dalamnya. Dengan adanya pendidikan di dalam kehidupan manusia, tentu saja mereka tidak akan mendapatkan dampak negatif yang di dapatkan dari luar pendidikan tersebut hingga bahkan dampak negatif tersebut dapat merugikan manusia. Selain itu, adanya pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan sebuah pedoman hidup manusia agar mereka bisa bertahan hidup, mengembangkan suatu inovasi terbaru bagi masa kini hingga masa yang akan datang, dan sebagai petunjuk dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pendidikan adalah suatu hal yang telah disepakati menjadi suatu hal yang penting dalam suatu bangsa dan negara

manapun. Kualitas pendidikan yang dimiliki oleh suatu bangsa dan negara tersebut dapat dijadikan sebuah acuan atau penentu dalam kemajuan bangsa dan negara tersebut.

Di negara Indonesia, pendidikan merupakan suatu hal pokok yang harus dipedulikan dan terus dikembangkan. Beraneka ragam upaya telah dikerahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan yang dinilai dapat menghambat proses kemajuan negara Indonesia itu sendiri. Permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, hingga saat ini masih cukup ramai untuk dibahas dan diteliti. Pasalnya, permasalahan pendidikan ini menjadikan sebuah tantangan yang sangat serius untuk dihadapi bagi Pemerintah Negara Indonesia, baik di masa sekarang hingga di masa yang akan datang. Permasalahan-permasalahan ini dimulai dari konsep pendidikan, pelaksanaan pendidikan, fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan pendidikan seperti kegiatan belajar mengajar, anggaran yang diperlukan, peraturan-peraturan yang mengenai pendidikan, dan sebagainya. Selain itu, berbagai permasalahan pendidikan yang harus ditangani dan solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan yaitu sebagai berikut (Dilansir dari website *School Development Outreach*) :

Keterbatasan Akses Pendidikan

Salah satu masalah utama dalam pendidikan di Indonesia yaitu keterbatasan akses pendidikan, terutama pada daerah pedesaan hingga pelosok. Dari daerah pedesaan hingga pelosok tersebut banyak sekali dijumpai anak-anak yang tidak bisa mengakses pendidikan berkualitas, karena disebabkan oleh jarak yang ditempuh sangat jauh, transportasi yang digunakan untuk menuju ke sekolah masih terbatas, dan fasilitas-fasilitas yang digunakan sebagai penunjang pendidikan dapat dikategorikan, sangat minim. Solusi yang bisa diberikan yaitu membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil yang belum mendapatkan pemerataan akses pendidikan dan menyediakan transportasi sekolah yang terjangkau untuk menempuh pendidikan yang layak.

Kualitas Guru

Jumlah guru atau tenaga pengajar di Indonesia dikategorikan sudah memadai, namun ternyata masih dapat ditemui permasalahan terkait kualitas belajar mengajarnya. Penyebab lainnya yaitu kurangnya pelatihan bagi guru yang dimana mereka berperan sebagai pelaku utama dalam proses pencapaian pendidikan berkualitas, sertifikasi yang lemah, dan kurangnya insentif untuk guru berkualitas yang dapat merugikan pendidikan

ANALISIS PROBLEMATIKA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DENGAN MENGGUNAKAN *PROBLEM TREE* ANALYSIS

dalam suatu daerah maupun negara. Solusi dari permasalahan ini yaitu dengan cara memberikan pelatihan ekstra pada guru, meningkatkan sistem sertifikasi, dan memberikan insentif yang menarik bagi guru.

Kurikulum yang Tidak Relevan

Meskipun kurikulum di Indonesia ini sering berubah-ubah, nyatanya masih belum bisa mengatasi permasalahan pendidikan tersebut dan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sehingga perlu dilakukan revolusi kurikulum untuk memastikan bahwa siswa dilatih dengan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja modern.

Kemiskinan dan Putus Sekolah

Kondisi ekonomi tiap masing-masing masyarakat, juga dapat menghambat proses mendapatkan pendidikan layak. Dari keterbatasan atau kesenjangan ekonomi tersebut, banyak anak-anak yang seharusnya masih dalam tahap menempuh pendidikan dan proses pembentukan karakter, akhirnya putus sekolah. Banyak sekali anak-anak diluar sana yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor ekonomi tersebut. Solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu meluncurkan program bantuan pendidikan dan melibatkan beberapa komunitas atau organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan, untuk memberikan ilmu atau wawasan yang mereka tidak dapatkan di bangku sekolah.

Masalah Finansial Siswa

Biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sangatlah tinggi. Dengan adanya latar belakang tersebut, dapat dipastikan menjadi hambatan bagi sejumlah siswa. Ketika sejumlah siswa tersebut mengeluhkan biaya pendidikan yang diperlukan sangat tinggi, maka selanjutnya akan terjadi banyak sekali putus sekolah. Solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu meluncurkan program beasiswa dan bantuan pendidikan secara merata dan sesuai sasaran yaitu anak-anak yang terhambat untuk menempuh pendidikan karena tingginya biaya pendidikan tersebut.

Dari permasalahan-permasalahan pendidikan diatas, diperlukannya peran dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut, sehingga permasalahan tersebut tidak akan mengganggu kemajuan bangsa dan negara tersebut. Sebelum peran pemerintah

dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat sebuah peraturan-peraturan yang mengatur dan menjelaskan terkait tugas serta kewajiban pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan baik di masa kini hingga masa yang akan datang. Peraturan-peraturan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 3 hingga ayat 5. Berikut bunyi dari pasal dan ayat masing-masing serta makna yang terkandung didalamnya :

a. Pasal 31 Ayat 3

Pasal tersebut berbunyi “*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang*”. Makna yang terkandung dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam urusan penyelenggaraan pendidikan nasional dan untuk mengembangkan serta menjamin kelangsungan hidup bangsa. Sehingga pendidikan nasional berperan untuk mengembangkan kemampuan, memerangi segala kekurangan, keterbelakangan, dan kebodohan hingga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan berlandaskan kebudayaan bangsa dan ke-Bhineka-Tunggal-Ika-an.

b. Pasal 31 Ayat 4

Pasal tersebut berbunyi : “*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*” Makna yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu menjelaskan bahwa pemerintah bertugas dan berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan nasional serta memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan memprioritaskan atau mengambil sebesar dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

c. Pasal 31 Ayat 5

Pasal tersebut berbunyi : “*Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*” Makna yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu menjelaskan bahwa pemerintah berperan penting dalam memajukan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan landasan

ANALISIS PROBLEMATIKA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DENGAN MENGGUNAKAN *PROBLEM TREE* ANALYSIS

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa agar masyarakat mampu merasakan kesejahteraan secara merata.

Terlihat jelas sudah, bahwasanya pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengentaskan permasalahan pendidikan, memajukan pendidikan, hingga bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara. Dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat berharap pemerintah agar mengambil langkah yang tegas untuk mengatasi problematika pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Beberapa masyarakat masih memiliki anggapan bahwasanya pendidikan merupakan sebuah keterpaksaan bukan sebagai kewajiban yang harus dihadapi dan dilakukannya. Selain itu juga, mereka beranggapan bahwa tolak ukur suatu keberhasilan hidup seseorang dilihat dari kemampuan ekonomi seseorang tersebut. Dengan adanya pemahaman seperti itu, menimbulkan akibat yang sangat fatal yaitu dimana banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya karena orang tua tersebut beranggapan bahwa anak-anak bisa mencari uang dan sukses tanpa harus bersekolah. Dari pemahaman atau anggapan tersebut saja sudah sangat berakibat fatal dan dapat dipastikan menghambat kemajuan bangsa dan negara, karena sumber daya manusianya saja masih tergolong rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, sumber daya manusia juga memiliki peranan dalam membangun pendidikan nasional serta kemajuan bangsa dan negara. Meskipun sumber daya manusia tersedia dengan jumlah yang sangat banyak, namun apabila kualitas atau mutu yang dimiliki masih rendah, sia-sia saja sudah.

Menurut Nurtanio dalam karyanya yang berjudul “*Kontribusi Pendidikan Bagi Pembangunan Ekonomi Negara*” menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu komponen sentral dalam pembangunan suatu bangsa. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa keberhasilan suatu negara dilihat dari seberapa majunya pendidikan dalam suatu negara dan seberapa besar dampak atau perubahan yang dihasilkan jika dilihat dari sektor ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Sekali lagi, pendidikan mempunyai dampak dan peranan penting bagi seluruh aspek-aspek kehidupan maupun aspek-aspek utama dalam pembangunan berkelanjutan serta kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Selain permasalahan-permasalahan pendidikan yang sudah dijelaskan dan dipaparkan diatas, terdapat sebuah

data yang menunjukkan bahwa rerata IQ warga Negara Indonesia, menduduki peringkat ke sepuluh dari seluruh Negara se ASEAN. Berikut data yang dimaksud:

		Rata-rata IQ	Populasi
1	Singapura	105,89	5.9 juta
2	Kamboja	99,75	16.7 juta
3	Myanmar	91,18	54.1 juta
4	Vietnam	89,53	98.1 juta
5	Thailand	88,87	71.6 juta
6	Malaysia	87,58	33.9 juta
7	Brunei Darussalam	87,58	449 ribu
8	Filipina	81,64	115.5 juta
9	Laos	80,99	7.5 juta
10	Indonesia	78,49	275.5 juta
11	Timor Leste	78,49	1.3 juta

Sumber: worldpopulationreview.com, 2022

Gambar 1.1 Data Statistik Rerata IQ Warga Negara Se ASEAN

Sumber : Portal-islam.id

Detail penjelasan dari IQ tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Detail tingkatan IQ Manusia

Skor IQ	Tingkatan IQ
70 - 79	Rendah (Keterbelakangan mental)
80 - 89	Bodoh
90 - 109	Normal (Rata-rata)
110 - 119	Normal (Cerdas)
120 – 129	Superior (Sangat Cerdas)
> 130	Sangat Superior (Genius)

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, terbukti bahwasanya IQ rerata Negara Indonesia berada di posisi paling bawah sendiri dari beberapa negara se ASEAN. Rendahnya IQ yang menjadi suatu penyebab bangsa dan neagra tidak bisa maju, merupakan masalah yang sangat serius untuk dihadapi serta juga harus sesegara mungkin untuk ditangani. Ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IQ masyarakat yang

ANALISIS PROBLEMATIKA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DENGAN MENGGUNAKAN *PROBLEM TREE* ANALYSIS

bisa dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan IQ. Berikut beberapa rekomendasi yang dimaksud untuk meningkatkan IQ masyarakat yaitu :

1. Menggerakkan minat masyarakat dalam membaca secara luas
2. Mencegah stunting pada ibu hamil dengan memberikan asupan bergizi, karena kecerdasan manusia mulai dibentuk semasa kehamilan
3. Menyediakan perpustakaan bergerak pada setiap sudut kota
4. Membuat konten video pembelajaran yang kreatif dan inspiratif serta mampu menarik minat masyarakat, karena masyarakat lebih suka menonton daripada membaca buku.

Demikianlah beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya pikir masyarakat dan IQ mereka. Dengan adanya rekomendasi tersebut diharapkan bangsa dan negara bisa kembali bersaing dengan negara lain dari segi sumber daya manusia yang dimilikinya. Pemerintah akan terus mencari cara untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pendidikan di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia sangatlah beragam, mulai dari menyalurkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan di berbagai sekolah, mengadakan dan meluncurkan program pelatihan untuk siswa hingga mahasiswa, hingga peluncuran program beasiswa dan bantuan pendidikan seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar), PIP (Program Indonesia Pemerintah), BLT (Bantuan Tunai Langsung), BOS (Dana Bantuan Operasional Sekolah), Beasiswa Afirmasi dan lain-lain. Meski pemerintah sudah mengerahkan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pada pendidikan dengan cara tersebut, sampai saat ini masih belum mencapai efektivitas dan keberhasilan yang diharapkan dari adanya upaya-upaya tersebut.

Mengutip *website* Kemdikbud.go.id, KIP atau Kartu Indonesia Pintar merupakan bentuk penanda atau identitas yang berfungsi bagi Peserta Didik hasil pemadanan Dapodik dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar. Sebelum Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dirilis dan diluncurkan, pemerintah melalui Kemenristekdikti merilis Program Beasiswa Bidikmisi. Pada tahun 2010, Beasiswa Bidikmisi dinilai telah membantu seluruh siswa lulusan SMA/SMK yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Selanjutnya pada tahun 2020, terdapat sebuah

perubahan dalam desain atau alur pembiayaan pendidikan. Lagi-lagi, pemerintah merilis dan meluncurkan Program Indonesia Pintar pada tahun ajaran 2020/2021. Program ini bermula dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan bentuk bantuan pendidikan yang nantinya akan diberikan untuk siswa SD, SMP hingga SMA. Seiring berjalannya waktu, menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Indonesia Pintar (PIP) mengalami perubahan nama menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dimana fungsi dan sasaran program ini masih sama dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut.

Seiring berkembangnya zaman, saat ini Kartu Indonesia (KIP) sudah tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa didapatkan melalui sekolah dengan mengakses aplikasi SIPINTAR. Kartu Indonesia (KIP) adalah sebuah program bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini memberikan bantuan kepada siswa-siswi dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk meringankan beban biaya pendidikan mereka. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini terbagi berdasarkan jenjang pendidikannya, yaitu terdiri dari KIP Sekolah dan KIP Kuliah. Kedua program tersebut, memiliki perbedaan baik secara definisi maupun sasaran program. Berikut perbedaan dari keduanya :

- KIP Sekolah diberikan kepada anak-anak yang menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, yaitu SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
- KIP Kuliah adalah bantuan dana pendidikan untuk anak yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi atau kuliah.

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) adalah kartu yang diberikan kepada lulusan SMA/sederajat sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP). KIP-K diberikan oleh pemerintah bagi siswa-siswi di Indonesia yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Program KIP-K ini diharapkan mampu meningkatkan pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) di Indonesia melalui berbagai upaya cerdas. KIP Kuliah berbeda dari beasiswa yang berfokus pada memberikan penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi. Hal ini sesuai penjelasan dari Pasal 76 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di Pasal 76 ayat 1 berbunyi, "*Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa*

ANALISIS PROBLEMATIKA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DENGAN MENGGUNAKAN *PROBLEM TREE ANALYSIS*

yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik". KIP-Kuliah memberikan akses kepada seluruh siswa di Indonesia untuk menggapai cita-cita melalui pendidikan tinggi.

Pelaksanaan atau implementasi dari program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berlandaskan pada panduan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kemendikbudristek. Dari hal tersebut, dapat dipastikan akan menimbulkan sebuah perbedaan terkait mekanisme pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada masing-masing Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Karena keduanya memiliki sumber daya dan cara pengelolaannya masing-masing. Meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan maupun tata kelola Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada setiap perguruan tinggi masing-masing, pada dasarnya harus sesuai dan berlandaskan dari ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Kemdikbudristek serta tidak menimbulkan kesulitan para calon mahasiswa baru yang kurang mampu hendak melanjutkan masa belajarnya di perguruan tinggi masing-masing.

Meskipun keberadaan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini sangat membantu mahasiswa yang ingin melanjutkan masa studinya di perguruan tinggi, nyatanya banyak sekali problematika-problematika yang terjadi. Beberapa problematika yang terjadi, hampir masyarakat mengetahuinya sehingga bukan rahasia umum lagi dan memerlukan penanganan khusus dari pemerintah agar problematika yang terjadi tidak menghambat proses pelaksanaan serta penyebaran program KIP-K di Indonesia.

TINJAUAN TEORITIS

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan sebuah proses pemilihan alternatif dalam suatu tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang melewati tahap-tahap seperti membuat tujuan yang spesifik, menentukan permasalahan, membuat alternatif pilihan, mengevaluasi alternatif pilihan, melaksanakan keputusan hingga proses kontrol dan evaluasi. Menurut Eisenfuhr (dalam Lumenburg, 2010) pengambilan keputusan adalah sebuah serangkaian proses dalam membuat pilihan dari beberapa alternatif untuk mendapatkan hasil yang sesuai atau diinginkan. Berdasarkan definisi tersebut, maka akan diambil keputusan dari beberapa alternatif penyelesaiannya namun harus melewati

beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pengambilan keputusan menurut Prastayawan dan Lestari (dalam karyanya yang berjudul “Pengambilan Keputusan”, 2019) yaitu sebagai berikut :

- a) Mendefinisikan permasalahan secara jelas sehingga nantinya mudah dimengerti
- b) Menyusun daftar permasalahan secara prioritas yang nantinya akan ditampilkan sehingga sistematikanya terarah dan terkendali
- c) Melakukan identifikasi permasalahan dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum yang lebih spesifik dan dapat dipahami
- d) Membagi dan mengelompokkan setiap permasalahan berdasarkan kelompoknya masing-masing dengan diiringi penggunaan alat uji yang akan dipakai
- e) Mengecek ulang alat uji yang digunakan apakah sesuai dengan aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku pada umumnya.

Model Pengambilan Keputusan dengan *Problem Tree Analysis*

Problem Tree Analysis adalah sebuah teknik pengambilan keputusan yang bentuknya menyerupai pohon dengan dimulai dari akar permasalahan hingga batang permasalahan dan membentuk pohon permasalahan yang utuh. Dalam penggunaan analisis pohon masalah, semua pihak yang terlibat akan melakukan identifikasi dan analisis sebuah permasalahan yang dilakukan secara beriringan. Hasil akhir dari analisis pohon masalah ini yaitu sebuah diagram yang berbentuk pohon yang berisikan akar permasalahan, fokus dan lokus permasalahan, penyebab dari permasalahan, hingga cabang permasalahan yang terdiri dari dampak permasalahan yang terkandung di dalamnya.

Untuk membuat pohon masalah ini, seorang peneliti harus melalui tiga tahapan dalam pembuatan pohon masalah. Tahapan-tahapan penyusunan pohon masalah ini terdiri dari sebagai berikut :

- a) Analisis permasalahan terkait dengan subjek masalah
- b) Analisis tujuan dari permasalahan
- c) Analisis strategi permasalahan

Penggunaan pohon masalah ini dapat memberikan sebuah kemudahan bagi para peneliti, yaitu peneliti bisa memecahkan permasalahan yang diangkat menjadi potongan-potongan kecil yang nantinya dapat dikelola dan diartikan dengan mudah. Selain itu,

ANALISIS PROBLEMATIKA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DENGAN MENGGUNAKAN *PROBLEM TREE* ANALYSIS

penggunaan pohon masalah ini juga dapat memberikan sebuah pemahaman secara terperinci kepada pembacanya yang dimana terdapat sebab dan akibat dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)

Menurut Kemdikbud, Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah merupakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah untuk siswa lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang ingin melanjutkan pendidikannya di Perguruan tinggi serta memiliki potensi akademik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan adanya program KIP-K ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan di perguruan tinggi sehingga calon mahasiswa tersebut bisa berkesempatan melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi yang dituju tanpa khawatir memikirkan biayanya. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) ini awalnya merupakan sebuah inovasi dari Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa bidikmisi yang dimana keduanya ini adalah sebuah bantuan dari pemerintah yang berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar untuk diberikan kepada peserta didik dari mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Dengan diluncurkannya program KIP-K ini, merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan layanan yang berupa bentuk jaminan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup yang diluncurkan pada tahun 2021. Tujuan lain dari adanya program KIP-K ini adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi dan mobilitas sosial bagi mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu untuk berkuliah.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019:2), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Prof. M.E. Winarno, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik-teknik yang sistematis. Dari pernyataan kedua ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan guna menyempurnakan dan membuktikan penelitian yang telah dilakukan.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang berjudul “Analisis Problematika Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah dengan Menggunakan Analisis Pohon Masalah (*Problem Tree Analysis*)” adalah studi literatur (*Literature Review*). Studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian (Danial dan Warsinah, 2009:80). Dengan hal tersebut, peneliti akan menggunakan beberapa sumber pustaka seperti jurnal, artikel-artikel ilmiah, buku-buku, dan media elektronik yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dan relevan dengan penelitian yang telah dilaksanakan.

Selain itu, fokus pada penelitian ini sendiri yaitu problematika dari penerapan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) secara umum lalu disajikan dengan diagram analisis pohon masalah atau *Problem Tree Analysis*. Terdapat tiga tahapan dalam proses *Problem Tree Analysis* ini yaitu analisis masalah terkait dengan subjek, analisis tujuan, dan analisis strategi. Hasil utama dari strategi ini berupa diagram berbentuk batang pohon yang mewakili fokus masalah, akar mewakili penyebab masalah dan cabangnya berupa dampak dari masalah tersebut. Dikutip dari zulkarnain, amardeep, dan fahkri (2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problem tree analysis atau analisis pohon masalah merupakan sebuah metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu permasalahan secara bersamaan. Hasil akhir dari analisis pohon masalah ini yaitu sebuah diagram yang berbentuk pohon yang berisikan akar permasalahan, fokus dan lokus permasalahan, penyebab dari permasalahan, hingga cabang permasalahan yang terdiri dari dampak permasalahan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penggunaan analisis akar permasalahan atau *problem tree analysis* ini memiliki keuntungan bagi para peneliti dalam sebuah penelitiannya. Keuntungan-keuntungan tersebut terdiri dari sebagai berikut:

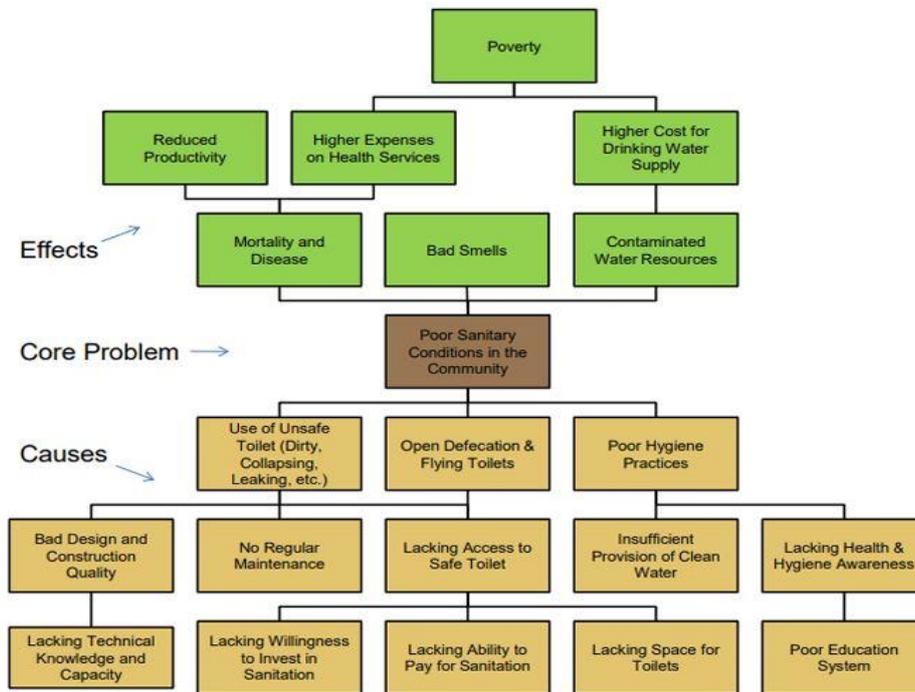
1. Dengan menggunakan teknik analisis pohon masalah ini, seorang peneliti bisa memecahkan permasalahan yang sedang diteliti menjadi butiran-butiran kecil sehingga memudahkan para peneliti menemukan sebab dan akibat dari permasalahan tersebut.

ANALISIS PROBLEMATIKA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DENGAN MENGGUNAKAN *PROBLEM TREE ANALYSIS*

2. Peneliti dapat menemukan sebab dan akibat yang sangat berpengaruh dalam permasalahan yang sedang terjadi
3. Dengan menggunakan analisis pohon masalah ini, peneliti akan menemukan serta menetapkan siapa dan faktor apa saja yang terdapat pada permasalahan yang sedang diteliti.
4. Hasil akhir dari penggunaan analisis pohon masalah ini yaitu berupa yang berbentuk diagram pohon, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mudah dipahami oleh orang banyak.
5. Analisis pohon masalah ini memudahkan peneliti dalam hal memprioritaskan solusi yang paling efektif.

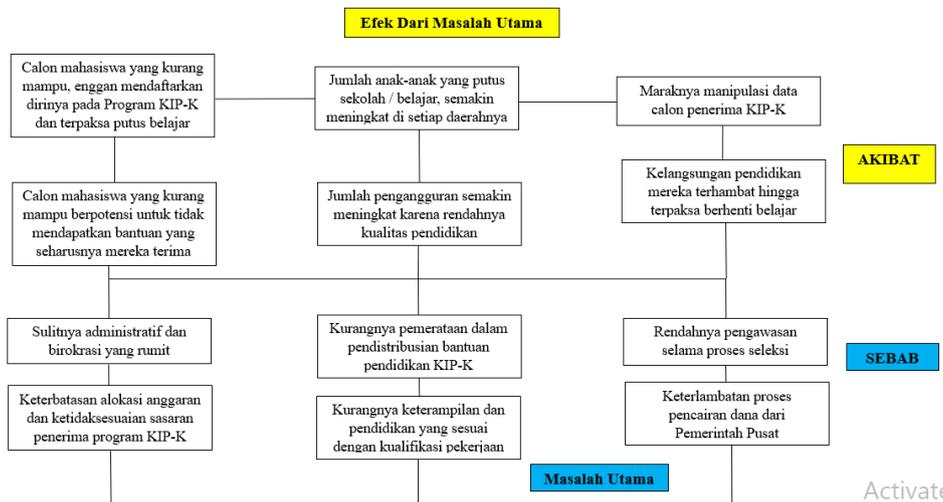
Dalam proses pelaksanaan penyebaran bantuan pendidikan yang berupa KIP-K , terdapat problematika atau permasalahan yang sering terjadi. Problematika-problematika tersebut, telah dijabarkan oleh peneliti menjadi enam bagian. Enam problematika tersebut telah diteliti dan diseleksi berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan serta berdasarkan fenomena yang sedang terjadi maupun telah terjadi. Enam problematika dalam KIP-K ini akan disajikan dengan diagram *Problem tree analysis* atau analisis pohon masalah dengan tujuan, untuk memberikan kemudahan dalam memahami isu-isu ataupun problematika mengenai Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) baik bagi masyarakat maupun bagi peneliti. Berikut analisis pohon masalah atau *Problem tree analysis* dari problematika-problematika pada program KIP-K:

Contoh Diagram Analisis Pohon Masalah atau *Problem Tree Analysis*



Gambar 1.2 Contoh Diagram *Problem Tree Analysis*

Diagram *Problem Tree Analysis* Problematika Program KIP-K



Gambar 2.1 Diagram *Problem Tree Analysis* "Problematika Program KIP-K"

Keterbatasan Alokasi Anggaran Dan Ketidakesesuaian Sasaran Penerima Program KIP-K

Salah satu masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan program beasiswa adalah keterbatasan alokasi anggaran dan ketidaksesuaian sasaran penerima program

ANALISIS PROBLEMATIKA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DENGAN MENGGUNAKAN *PROBLEM TREE* ANALYSIS

KIP-K. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan keterbatasan alokasi anggaran dan ketidaksesuaian sasaran penerima program KIP-K:

1. **Pengelolaan Keuangan Inefisien:** Pengelolaan keuangan yang tidak efisien dapat menyebabkan keterbatasan alokasi anggaran, misalnya, pengeluaran yang tidak perlu
2. **Sasaran Program Tidak Sesuai:** Tujuan program dapat membatasi alokasi anggaran jika tidak sesuai dengan kebutuhan dan permintaan penerima beasiswa. Misalnya, jika tujuan program tidak sesuai dengan kebutuhan penerima beasiswa, penerima beasiswa tidak akan dapat menggunakan dana beasiswa untuk memenuhi kebutuhan mereka.
3. **Pengelolaan Beasiswa Tidak Transparan:** Jika pengelolaan beasiswa tidak transparan, anggaran dapat terbatas. Misalnya, penerima beasiswa tidak akan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengatur dana beasiswa sesuai dengan sasaran program.
4. **Sumber Daya Manusia Tidak Mencukupi:** Anggaran dapat dibatasi jika sumber daya manusia terbatas. Misalnya, jika sumber daya manusia tidak mencukupi untuk mengelola beasiswa, maka penerima beasiswa tidak akan dapat mendapatkan bantuan yang diperlukan.
5. **Pengelolaan Beasiswa Tidak Tepat Waktu:** Pengelolaan beasiswa yang tidak tepat waktu dapat mengganggu alokasi anggaran. Misalnya, jika pengelolaan beasiswa tidak tepat waktu, penerima beasiswa tidak akan dapat mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Untuk mengatasi masalah alokasi anggaran yang terbatas dan ketidaksesuaian sasaran penerima program KIP-K, perlu dilakukan pengelolaan keuangan yang efektif, pengelolaan beasiswa yang transparan, pengelolaan beasiswa yang tepat waktu, dan pengelolaan beasiswa yang sesuai dengan sasaran program. Selain itu, perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi program beasiswa untuk menyesuaikan sasaran program dengan kebutuhan penerima beasiswa.

Sulitnya Administratif Dan Birokrasi Yang Rumit

Penerima beasiswa dapat mengalami kesulitan saat mengakses dan melakukan pengajuan KIP-K karena administrasi dan birokrasi yang rumit. Berikut ini beberapa faktor yang dapat menyebabkan administrasi dan birokrasi yang rumit:

1. **Prosedur Pengajuan yang Rumit:** Prosedur pengajuan yang rumit dapat membuatnya sulit bagi penerima beasiswa untuk mengakses dan melakukan pengajuan. Sulit bagi penerima beasiswa untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan jika proses pengajuan tidak efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan penerima beasiswa.
2. **Ketidaksesuaian Informasi:** Jika informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan penerima beasiswa, maka akan sulit bagi mereka untuk mengatur dana beasiswa untuk mencapai sasaran program.
3. **Tidak Ada Transparansi:** Jika pengelolaan beasiswa tidak transparan, penerima beasiswa dapat sulit mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengatur dana beasiswa sesuai dengan sasaran program.
4. **Tidak Ada Sistem Terpusat:** Jika tidak ada sistem pengelolaan beasiswa yang terpusat, penerima beasiswa dapat mengalami kesulitan untuk menemukan informasi yang diperlukan dan melakukan pengajuan yang sesuai dengan sasaran program.

Untuk memecahkan masalah administrasi dan birokrasi yang rumit pada pelaksanaan KIP-K, perlu dilakukan pengelolaan administrasi yang efisien, pengelolaan informasi yang transparan, dan pengelolaan beasiswa yang terpusat. Selain itu, perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi terhadap prosedur pengajuan dan informasi yang diberikan untuk menyesuaikan prosedur pengajuan dengan kebutuhan penerima beasiswa.

Kurangnya Pemerataan Dalam Pendistribusian Bantuan Pendidikan KIP-K.

Beberapa faktor dapat menyebabkan ketidaksamaan dalam distribusi bantuan pendidikan KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah). Antara lain:

1. **ketidakakuratan dalam menentukan calon siswa penerima KIP,** yang dapat menyebabkan distribusi bantuan pendidikan tidak merata.

ANALISIS PROBLEMATIKA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DENGAN MENGGUNAKAN *PROBLEM TREE* ANALYSIS

2. Sosialisasi Program KIP Kurang Optimal: Masalah sosialisasi program KIP yang kurang efektif dapat menyebabkan bantuan pendidikan didistribusikan secara tidak merata.
3. Keterlambatan Dalam Pencairan Dana: Keterlambatan dalam pencairan dana dapat menyebabkan penerima bantuan tidak dapat menggunakan dana sebagaimana yang diinginkan.
4. Kurang Transparansi Informasi: Kekurangan transparansi informasi dapat menyebabkan penerima bantuan tidak mengetahui informasi yang diperlukan untuk mengatur dana bantuan pendidikan yang sesuai dengan sasaran program.

Untuk menyelesaikan masalah ketidaksamaan dalam pendistribusian bantuan pendidikan KIP-K, administrasi yang efektif, pengelolaan informasi yang jelas, dan pengelolaan beasiswa yang terpusat diperlukan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap prosedur pengajuan dan informasi yang diberikan agar prosedur tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan penerima beasiswa.

Kurangnya Keterampilan Dan Pendidikan Yang Sesuai Dengan Kualifikasi Pekerjaan

Kualifikasi atau syarat pekerjaan yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan dari tahun ke tahun selalu mempunyai keketatan tiap tahunnya disertai dengan kualifikasi kerja yang tinggi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk memperoleh atau memenuhi kualifikasi pekerjaan tersebut, diperlukan kualitas pendidikan serta keterampilan yang memadai dari calon pegawai tersebut. Kualitas pendidikan menjadi peran utama dalam menentukan kualifikasi kerja dan juga membangun keterampilan dari setiap individu masing-masing. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan :

1. Adanya perubahan cepat dalam tuntutan pekerjaan sehingga para pegawai dituntut untuk memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
2. Kesenjangan ekonomi yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan pendidikan dan tidak mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan

3. Kurangnya pemerataan bantuan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam menempuh pendidikan sehingga mereka terpaksa putus sekolah dan menjadi pengangguran
4. Kurangnya bantuan dalam hal pemberian pendidikan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam menempuh pendidikan
Untuk mengatasi permasalahan kurangnya keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan menurut peneliti yaitu pemerintah bisa memberikan sebuah bantuan gratis yang berupa pemberian pelatihan kerja dan pendidikan karakter kepada masyarakat yang kurang mampu serta tidak dapat melanjutkan pendidikannya karna beberapa hal. Sehingga mereka nantinya akan mendapatkan keterampilan atau kemampuan yang memadai dan sesuai dengan kualifikasi kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan.

Rendahnya Pengawasan Selama Proses Seleksi

Rendahnya pengawasan selama proses seleksi merupakan masalah yang sangat serius dan juga dapat memengaruhi keberhasilan dan keadilan dari program KIP-K tersebut. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pengawasan terhadap proses seleksi program KIP-K ini yaitu terdiri dari :

1. Adanya pengaruh dari pihak eksternal yang kuat, sehingga dapat melakukan kecurangan selama proses seleksi program KIP-K
2. Kurangnya sumber daya manusia yang tersedia selama proses seleksi program KIP-K sehingga keamanannya rendah dan memungkinkan terjadi kecurangan dalam proses seleksi
3. Terjadinya ketidakpercayaan terhadap institusi terkait yang bertanggung jawab atas pengawasan seleksi program KIP-K tersebut
4. Adanya para oknum yang dapat memanipulasi data calon peserta KIP-K

Untuk menangani permasalahan ini yaitu, penyelenggara program KIP-K ini yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi atau Kemdikbudristek menambah sumber daya manusia yang nantinya akan bertugas untuk melakukan pengawasan selama proses seleksi KIP-K sedang berlangsung, dan juga membuat regulasi atau aturan yang lebih ketat lagi selama pelaksanaan program KIP-K sedang berlangsung.

ANALISIS PROBLEMATIKA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DENGAN MENGGUNAKAN *PROBLEM TREE ANALYSIS*

Keterlambatan Proses Pencairan Dana dari Pemerintah Pusat

Keterlambatan proses pencairan dana dari pemerintah pusat untuk mahasiswa penerima program KIP-K ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Banyaknya Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) yang belum mendata mahasiswanya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), sehingga mahasiswa yang belum terdata tersebut tidak mendapatkan pencairan dana untuk pembayaran biaya kuliah dan kebutuhan hidupnya.
2. Adanya keterlambatan selama proses pendataan mahasiswa calon penerima program KIP-K
3. Terdapat perubahan pada PTN / PTS baik dalam nama, sistem pendidikan, dan lain-lain yang menyebabkan waktu yang lama untuk pembuatan rekening mahasiswa penerima program KIP-K yang nantinya digunakan untuk pencairan dana dari pemerintah tersebut.
4. Pada PTN / PTS terkait belum mempunyai Surat Keputusan (SK) atau surat dari pimpinan Perguruan Tinggi terkait daftar calon mahasiswa penerima Program KIP-K

Untuk mengatasi masalah keterlambatan proses pencairan dana dari Pemerintah Pusat ini, yaitu diperlukan kerja sama dari kedua belah pihak PDDikti dan Pihak yang bertugas untuk menangani KIP-K di Universitas masing-masing dan juga pihak Universitas harus lebih hati-hati dalam proses pendataan calon mahasiswa penerima program KIP-K agar calon mahasiswa yang kurang mampu dan yang diterima di Universitas, bisa melanjutkan pendidikannya tanpa rasa khawatir terkait biaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis pohon masalah terkait Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi pelaksanaan program, distribusi bantuan, pemenuhan persyaratan, dan penyelesaian studi sesuai peraturan akademik. Analisis pohon masalah membantu dalam mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat yang mempengaruhi permasalahan yang terjadi dalam program KIP-K. Dengan memahami struktur permasalahan melalui analisis pohon masalah, pemangku kepentingan dapat memprioritaskan solusi yang efektif untuk meningkatkan kinerja program. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan

pemecahan permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih terkelola, sehingga mempermudah implementasi solusi yang tepat dan efisien. Dengan demikian, penggunaan analisis pohon masalah memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis terhadap permasalahan yang dihadapi, serta membantu dalam merancang strategi penyelesaian yang lebih terarah dan efektif.

Berdasarkan analisis pohon masalah terkait Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas program tersebut:

1. Perbaikan Pelaksanaan Program: Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program KIP-K untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi selama proses implementasi. Langkah-langkah perbaikan dan peningkatan efisiensi harus diimplementasikan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
2. Optimalisasi Distribusi Bantuan: Penting untuk memastikan distribusi bantuan KIP-K dilakukan secara transparan, adil, dan efisien. Sistem distribusi harus diperbarui dan ditingkatkan agar bantuan dapat tersampaikan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat.
3. Pemenuhan Persyaratan: Diperlukan langkah-langkah untuk mempermudah proses pemenuhan persyaratan bagi calon penerima bantuan KIP-K. Sistem verifikasi dan validasi data harus diperkuat untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pemantauan dan Evaluasi: Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program KIP -K untuk mengidentifikasi potensi masalah dan hal – hal yang memerlukan perbaikan .melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program KIP -K untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan hal – hal yang memerlukan perbaikan . Informasi informasi dan datadan data diperoleh daridiperoleh dari proses ini dapat digunakan untuk menghasilkan keputusan program yang lebih akurat dan efisien .proses ini dapat digunakan untuk menghasilkan keputusan program yang lebih akurat dan efisien .

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi di atas, diharapkan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan

ANALISIS PROBLEMATIKA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DENGAN MENGGUNAKAN *PROBLEM TREE* ANALYSIS

pendidikan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, A., Sasongko, R. N., & Yuneti, A. (2022). Kebijakan Kartu Indonesia Pintar untuk Memerdekakan Mahasiswa Kurang Mampu. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 5(1), 98–107. <https://doi.org/10.31539/alignment.v5i1.3803>.
- Dwi, A. (2023, Juli 12). *Masalah Pendidikan Yang Umum Terjadi di Indonesia*. Dipetik Maret 28, 2024, dari fkip.umsu.ac.id: <https://fkip.umsu.ac.id/masalah-pendidikan-yang-umum-terjadi-di-indonesia>.
- Handoyo, A. D., & Zulkarnaen. (2019). Faktor-faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*, 1(1), 21–24. <https://bimawa.uad.ac.id/wp-content/uploads/Paper-Seminar-Nasional-2.pdf>
- Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., Surabaya, U. N., Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., & Surabaya, U. N. (2022). *EVALUASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA* Fatimah Sariri Indah Prabawati.
- Karim, A. (2022, April 9). *Mengatasi Sistem Pendidikan Indonesia yang Rendah*. (Kumparan.com) Dipetik April 11, 2024, dari kumparan.com: <https://kumparan.com/alvin-karim/mengatasi-sistem-pendidikan-indonesia-yang-rendah-1xqRqGympm2>.
- Kemdikbud. (2022). Kip Kuliah Merdeka. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*. <https://lldikti6.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/PUSLAPDIK-20220725-Bahan-Pendampingan-KIPK-LLDIKTI-PTS.pdf>
- Nurhuda, H., Tinggi, S., & Islam, A. (n.d.). *Faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan National Education Problems ; Factors and Solutions*. 127–137.
- Richard, O. (2021). Pengertian Pengambilan Keputusan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Rohmah, E. N. L., & Kasmawanto, Z. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta. *Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 85–104.

- Salsabila, N. (2024, Maret 5). *KIP Kuliah 2024: Jadwal, Cara Daftar, Syarat & Keunggulannya*. (Brain Academy) Dipetik April 6, 2024, dari brainacademy.id: <https://www.brainacademy.id/blog/kip-kuliah>
- School Development Outreach. (2023, Desember 20). *Masalah Pendidikan di Indonesia: Menganalisis 10 Tantangan Utama dan Solusinya*. Dipetik Maret 29, 2024, dari psfoureach.com: <https://psfoureach.com/masalah-pendidikan-menganalisis-10-tantangan-utama-dan-solusinya/>.
- Tinggi, P., Menuju, S., Maju, I., Huda, S., As'ad, M. U., Kuncoro, D., & Aidah, N. A. (2023). Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (Kip-K) Di Universitas Diponegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.48093/jiask.v5i1.91>.
- Widoyo, H. (2023, Februari 23). *Pentingnya Pendidikan Dalam Kehidupan*. (Binus) Dipetik April 5, 2024, dari binus.ac.id: <https://binus.ac.id/character-building/2023/02/pentingnya-pendidikan-dalam-kehidupan/>
- Wulandari, T. (2022, Januari 13). *Isi Pasal 31 Ayat 1-5 UUD 1945 dan Hak Warga Negara Indonesia*. (Detik.Com) Dipetik Maret 25, 2024, dari detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5895945/isi-pasal-31-ayat-1-5-uud-1945-dan-hak-warga-negara-indonesia>.